

# IMPLEMENTASI TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MEWUJUDKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* DESA

(Studi Kasus: BUMDes Bahtera Mandiri di Desa Jenggala, KLU)

Enis Tasia<sup>1</sup>

[enistasia07@gmail.com](mailto:enistasia07@gmail.com)

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

Rr. Sri Pancawati Martiningsih<sup>2</sup>

[pancawati@unram.ac.id](mailto:pancawati@unram.ac.id)

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip tata kelola BUMDes Bahtera Mandiri dalam mewujudkan sustainable development goals desa. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara yang dilakukan dengan direktur BUMDes, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip tata kelola kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan telah mampu membantu BUMDes Bahtera Mandiri dalam mewujudkan SDGs desa. Terdapat 4 sasaran SDGs desa yang ditunjukkan melalui BUMDes Bahtera Mandiri, diantaranya yaitu desa tanpa kemiskinan, pendidikan desa berkualitas, kawasan permukiman desa aman dan nyaman, dan desa damai berkeadilan. Ke-4 SDGs desa ini merupakan pencapaian yang diwujudkan oleh Desa Jenggala melalui kontribusi BUMDes Bahtera Mandiri meskipun belum maksimal namun BUMDes Bahtera Mandiri berusaha membantu desa untuk mencapai SDGs. Implikasi pada penelitian ini yaitu BUMDes Bahtera Mandiri tidak hanya berfokus pada profitabilitas ekonomi, tetapi juga pada pemberian manfaat nyata kepada masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya.

**Kata kunci:** BUMDes, SDGs desa, tata kelola

## ABSTRACT

*This research aims to analyze the governance principles of BUMDes Bahtera Mandiri in realizing the village's sustainable development goals. In this research the researcher used a qualitative descriptive method. To obtain the necessary data, the author used data collection methods, namely observation, documentation and interviews conducted with BUMDes directors, village officials and the village council. The results of this research show that the principles of cooperative, participatory, emancipatory, transparent, accountable and sustainable governance have been able to help BUMDes Bahtera Mandiri in realizing village SDGs. There are 4 village SDGs targets demonstrated through BUMDes Bahtera Mandiri, including villages without poverty, quality village education, safe and comfortable village residential areas, and peaceful villages with justice. These 4 village SDGs are achievements realized by Jenggala Village through the contribution of BUMDes Bahtera Mandiri, although it is not optimal, BUMDes Bahtera Mandiri is trying to help the village to achieve the SDGs. The implication of this research is that BUMDes Bahtera Mandiri does not only focus on economic profitability, but also on providing real benefits to village communities and the surrounding environment.*

**Keywords:** BUMDes, governance, village SDGs

## **PENDAHULUAN**

Di Indonesia pembangunan pedesaan merupakan salah satu cara dalam upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 mengakui adanya otonomi desa, dan dengan adanya otonomi desa tersebut diharapkan desa dapat meningkatkan roda perekonomian negara melalui pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan kearifan lokal skala desa (Napitupulu et al., 2019).

Pada dasarnya pembangunan bertujuan untuk membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan dengan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya upaya yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan produktivitas dan berbagai jenis usaha, sarana dan fasilitas untuk mendukung perekonomian di desa, membangun dan mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan secara berkelanjutan.

*Sustainable development goals* atau biasa disingkat dengan SDGs merupakan suatu program mendunia jangka panjang guna meningkatkan sumber daya serta potensi yang ada pada setiap negara. *Sustainable development goals* (SDGs) diresmikan pada 25 September 2015 di kantor pusat PBB New York (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018). Tujuan dari SDGs ini adalah untuk mencapai tiga dimensi yaitu sosial, lingkungan, dan ekonomi (Tysara, 2021). Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan aktif dalam penentuan sasaran SDGs secara nasional. Oleh karena itu, Menteri Desa melaksanakan penerapan SDGs desa untuk mendukung pencapaian SDGs nasional. Tujuan SDGs desa yaitu upaya terpadu untuk mewujudkan desa ekonomi tumbuh merata. Percepatan pencapaian SDGs desa dilakukan dengan memprioritaskan penggunaan dana desa untuk program atau kegiatan pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa (Yuliana & Alinsari, 2022).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sofyani et al. (2020) memaparkan bahwa dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) oleh pemerintah merupakan salah satu usaha untuk memandirikan desa dalam mengatur perekonomian desa. Membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakatnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah salah satu misi pemerintah yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Semenjak dikeluarkannya Undang-Undang No 6 tentang Desa tahun 2014, BUMDes menjadi salah satu alat pembangunan di desa untuk meningkatkan perekonomian desa, peningkatan pendapatan desa, meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta diharapkan dapat menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Tujuan didirikannya BUMDes adalah untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. Untuk terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa melalui BUMDes, maka pengelolaan dalam BUMDes harus berdasarkan dengan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes. Menurut Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), prinsip tata kelola BUMDes terdiri dari, kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan *sustainable*. Prinsip tata kelola BUMDes sangat berperan dalam rangka mewujudkan SDGs desa, karena semakin baiknya pengelolaan yang ada pada suatu BUMDes maka BUMDes akan semakin baik dalam melakukan kegiatan operasional. Sehingga semakin baik jalannya suatu BUMDes, SDGs desa akan semakin dapat diwujudkan. Pernyataan tersebut setara dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sofyani et al. (2020) yang menemukan bahwa tingginya penerapan prinsip tata kelola dalam BUMDes, maka kinerja BUMDes juga akan semakin baik, dan sebaliknya praktik tata kelola yang rendah pada BUMDes dapat menghambat BUMDes memiliki kinerja yang baik.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliana & Alinsari (2022) menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola di BUMDes yang baik dan konsisten dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian desa. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Desa Bejalan telah merealisasikan salah satu program SDGs desa yaitu pertumbuhan ekonomi desa yang merata melalui BUMDes Estu Mukti. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Adha (2022) menunjukkan bahwa program SDGs yang ada di Desa Hulu masih dalam kategori kurang efisien karena masih ada program SDGs yang belum tercapai sehingga masih ada masyarakat yang tidak merasakannya. Realitanya masih ada masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan.

Desa Jenggala merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Setiap desa yang berada di Kabupaten Lombok Utara memiliki beberapa BUMDes yang

dijalankan. Namun, dari beberapa desa yang berada di Kecamatan Tanjung BUMDes yang paling menonjol dalam mewujudkan SDGs desa adalah BUMDes Bahtera Mandiri yang berada di Desa Jenggala. Dalam Peraturan Desa Jenggala Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bahtera Mandiri disebutkan bahwa BUMDes Bahtera Mandiri didirikan pada tahun 2018. BUMDes Bahtera Mandiri memiliki tiga unit usaha yang terdiri dari; unit tempat pengelolaan sampah *reduce, reuse, recycle* (TPS3R), unit wisata kolam Tiu Bangket, dan unit klinik pertanian.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan, peneliti menyimpulkan adanya inkonsisten hasil penelitian terdahulu, hal ini menarik peneliti untuk melakukan penelitian mengenai tata kelola BUMDes. Penelitian ini berusaha melihat bagaimana penerapan tata kelola BUMDes dalam mewujudkan SDGs Desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini akan lebih menjelaskan secara rinci bagaimana penerapannya tata kelola BUMDes yang didasarkan pada prinsip tata kelola BUMDes yang kemudian peneliti menjabarkan apakah telah mewujudkan salah satu dari 18 tujuan SDGs Desa.

## TELAAH LITERATUR

### Teori *Social Enterprises*

*Social enterprise* dipandang sebagai agen perubahan yang dapat mengubah cara berfikir dan berperilaku melalui produk dan pelayanan yang inovatif. *Social enterprise* ada untuk mengatasi isu sosial terkait dengan kemiskinan, kelaparan dan ketidakmerataan yang sedang meningkat khususnya pada jumlah yang besar. *Social enterprise* yaitu suatu metode pemecahan masalah melalui model pendekatan bisnis. *Social enterprise* adalah entitas bisnis dengan misi sosial pada eksistensi tujuan dan menghasilkan laba untuk mengatasi kebutuhan misi sosial (Nasruddin & Misaridin, 2014).

Widiastuti et al. (2019) menjelaskan saat ini *social enterprise* dikenal sebagai produk dan pelayanan untuk menyediakan pekerjaan bagi orang cacat, miskin, mantan tahanan, serta menawarkan solusi dalam rangka untuk memberantas kemiskinan atau menyediakan pendidikan untuk anak-anak yang tidak mampu sebagai salah satu cara mengatasi masalah sosial. *Social enterprise* menawarkan solusi yang cepat untuk mengatasi masalah melalui Operationalisasi Model Bisnis Sosial. Model bisnis sosial membentuk nilai baru untuk masyarakat dalam mengejar kesempatan baru dan mengisi GAP pada usaha untuk mengatasi masalah sosial. *Social enterprise* mengatasi masalah sosial melalui usaha (bisnis). Konsep bisnis mengkombinasikan efisiensi, inovasi, nilai, semangat, dan tujuan untuk mencari keuntungan ekonomi serta keuntungan non ekonomi.

### *Sustainable Development Goals*

*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah suatu program mendunia jangka panjang guna meningkatkan sumber daya serta potensi yang ada pada setiap negara. SDGs ini merupakan sebuah kelanjutan dari adanya *Millennium Development Goals* (MDGs). *Millennium Development Goals* (MDGs) ini yaitu sebuah deklarasi hasil dari kesepakatan 189 negara PBB pada September tahun 2000 dan berakhir pada tahun 2015 karena pencapaian tujuan dari MDGs ini hanya mempunyai sasaran waktu hingga tahun 2015, kemudian di ganti dengan pembangunan global baru yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang di sepakati oleh 193 negara PBB salah satunya Indonesia sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 (Hidayat, 2022). Menurut Iskandar (2020) SDGs desa merupakan upaya terpadu mewujudkan untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui penguatan tipologi: desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa dengan pertumbuhan ekonomi yang merata, peduli kesehatan, peduli lingkungan, peduli pendidikan, ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa yang tanggap budaya. Berdasarkan *Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Permendes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat disebutkan bahwa SDGs desa terdiri dari 18 sasaran dan tujuan pembangunan, yaitu desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa peduli kesehatan, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa, desa layak air bersih dan sanitasi, desa berenergi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi desa merata, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, desa tanpa kesenjangan, kawasan permukiman desa aman dan nyaman, konsumsi dan produksi desa

sadar lingkungan, desa tanggap perubahan iklim, desa peduli lingkungan laut, desa peduli lingkungan darat, desa damai berkeadilan, kemitraan untuk pengembangan desa, dan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

### **Tata Kelola**

Menurut Sofyani et al. (2020) tata kelola merupakan seperangkat proses yang diberlakukan didalam organisasi yang kemudian hal tersebut dijadikan sebagai prinsip dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Penerapan prinsip tata kelola yang baik dan sesuai aturan mampu meningkatkan kinerja suatu organisasi dan membantu dalam pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan pendapat beberapa para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa *governance* merupakan tata kelola atau proses pengelolaan sumber daya dalam suatu organisasi untuk menciptakan suatu keadaan organisasi yang lebih efektif dan efisien.

### **Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Badan Usaha Milik Desa atau yang biasa disingkat dengan BUMDes merupakan strategi kebijakan yang dibentuk pemerintah untuk membangun Indonesia dari desa melalui pengembangan usaha ekonomi di desa. Sebagai pilar kegiatan ekonomi di desa yang didirikan atas dasar prakarsa masyarakat, maka dibuat berdasarkan kebutuhan dan potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Napitupulu et al., 2019). Dengan adanya BUMDes ini diharapkan dapat membantu desa dan pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian desa. Desa dapat menjadi mandiri dalam mengelola serta menjalankan perekonomian desa. Sehingga dengan hal tersebut tujuan Indonesia dapat terpenuhi melalui desa, yaitu memajukan kesejahteraan umum (kesejahteraan desa). Menurut Wahyuni et al. (2022) tujuan pembentukan BUMDes ini dijelaskan antara lain:

- a. Menghindarkan anggota masyarakat desa dari pengaruh pemberian pinjaman uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat.
- b. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
- c. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan, gotong royong masyarakat gemar menabung secara tertib, teratur dan keberlanjutan.
- d. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa.
- e. Mendorong berkembangnya usaha sector informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa.

### **Prinsip-Prinsip BUMDes**

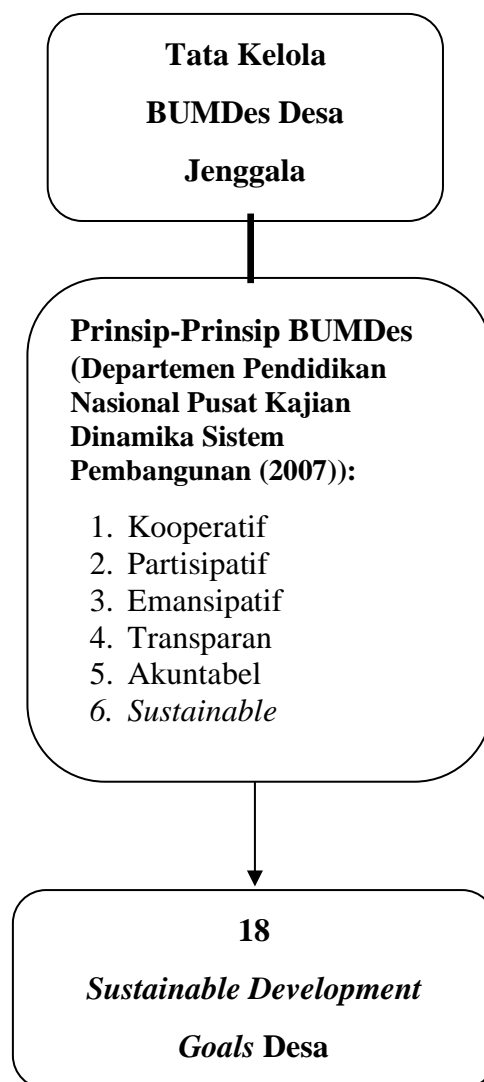
Dalam buku panduan BUMDes yang di keluarkan Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

1. Kooperatif, yaitu semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya
2. Partisipatif, yaitu semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi (seperti sumbangsi pemikiran atau ide) yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
3. Emansipatif, yaitu semua komponen yang terlibat di dalam BUMDesa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. Transparan, yaitu aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. Akuntabel, yaitu seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.

*Sustainable* atau keberlanjutan, yaitu kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

### Kerangka Konsep Penelitian

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa. BUMDes didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana tujuan BUMDes adalah untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa kemudian meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Dengan adanya program BUMDes ini pemerintah dapat membangun kepercayaan dengan masyarakat untuk saling bekerja sama dalam mewujudkan masyarakat desa yang mandiri secara ekonomi. Sebagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam mengelola BUMDes agar BUMDes dapat terkelola dengan baik dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola seperti kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabl, dan *sustainable*/berkelanjutan. Dengan penerapan tata kelola yang baik, maka BUMDes ini dapat memberikan kelangsungan perekonomian desa yang lebih stabil dan berkelanjutan. Selain itu, BUMDes juga memberikan keuntungan bagi masyarakat desa pada umumnya, yaitu terbentuknya masyarakat desa untuk mengangkat potensi desa, menciptakan lapangan kerja, dan menjadi lebih produktif. Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Sehingga dapat mewujudkan SDGs Desa.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan dan Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi deskriptif sebagai desain penelitiannya. Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sebanyak-banyaknya. Riset ini tidak mengutamakan besarnya populasi. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya.

### **Informan dan kehadiran Peneliti**

Informan merupakan seseorang yang benar-benar mengetahui permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami permasalahan tersebut. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Direktur BUMDes
- 2) Kepala Desa
- 3) Badan Permusyawaratan Desa

### **Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang benar maka peneliti akan mendapatkan data-data yang memenuhi standar. Berikut ini beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### **Keabsahan Data**

Keabsahan data ini diperlukan untuk menentukan valid atau tidaknya suatu temuan atau data yang dilaporkan peneliti dengan yang terjadi sesungguhnya di lapangan. Pada penelitian ini teknik yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda untuk membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan sehingga data dapat dipastikan keakuratannya. Dengan demikian triangulasi bukan bertujuan mencari kebenaran, tapi meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimilikinya.

### **Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data kualitatif deskriptif dari Miles & Huberman (1992) yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Metode analisis data deskriptif dapat dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data (*Display Data*), dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

Penerapan prinsip tata kelola pada BUMDes berperan penting dalam mewujudkan SDGs desa. Enam komponen prinsip tata kelola (kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan *sustainable/berkelanjutan*) digunakan dalam menjalankan suatu BUMDes agar lebih efektif dan efisien dalam menjalankan aktivitas usaha.

1. Prinsip tata kelola kooperatif dalam BUMDes Bahtera Mandiri tergolong cukup baik karena sudah melakukan kerja sama dengan pihak lain selain itu juga BUMDes Bahtera Mandiri selalu dapat menyelesaikan permasalahan yang ada melalui musyawarah desa.
2. Bentuk partisipatif masyarakat Desa Jenggala dalam mendukung BUMDes Bahtera Mandiri cukup tinggi, hal ini ditunjukkan dengan kehadiran masyarakat pada saat pembentukan BUMDes dan pengurus BUMDes dan juga keterlibatan dalam memberikan ide terkait jenis usaha yang akan dijalankan oleh BUMDes yang dihadiri

- oleh Perangkat desa, BPD (Badan Perwakilan Rakyat), tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat, RT dan RW.
3. Prinsip emansipatif pada BUMDes Bahtera Mandiri cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan proses pemilihan pengurus BUMDes yang memberikan kesempatan bagi siapa saja yang ingin menjadi pengurus, selain itu juga BUMDes Bahtera Mandiri berusaha untuk merangkul masyarakat marjinal dengan cara melibatkannya pada kegiatan BUMDes. Namun, dalam penerapan prinsip emansipatif ini masih terdapat kekurangan dimana dalam proses pemilihan pengurusnya tidak adanya aturan standar sehingga kinerja pengurus menjadi kurang baik.
  4. BUMDes Bahtera Mandiri sudah menerapkan prinsip transparansi melalui pengadaan aset yang melibatkan masyarakat desa dan semua komponen yang terlibat dalam BUMDes, keterbukaan laporan keuangan yang dapat diketahui oleh masyarakat, pemantauan kinerja dan evaluasi pengurus yang rutin dilakukan melalui rapat koordinasi, dan pembagian hasil keuntungan BUMDes dari tiap unit.
  5. BUMDes Bahtera Mandiri telah menunjukkan prinsip akuntabel dalam pengelolaannya melalui berbagai dokumen dan prosedur yang sudah ada. Dokumen-dokumen tersebut mencakup adanya dokumen AD/ART, dokumen rencana usaha, dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja, dan laporan keuangan BUMDes. Namun, BUMDes Bahtera Mandiri masih memiliki kekurangan yaitu belum adanya rencana strategis 5 tahun, hanya sampai 3 tahun.
  6. Sudah menjalankan usaha sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat, dan dari usaha yang dijalankan tidak ada yang memiliki dampak buruk terhadap lingkungan. Meskipun BUMDes Bahtera Mandiri belum memiliki rencana pengembangan usaha, namun BUMDes Bahtera Mandiri akan semakin memaksimalkan unit usaha yang ada saat ini supaya dapat berjalan maksimal.

Prinsip tata kelola yang baik pada suatu BUMDes akan mampu menciptakan suatu BUMDes yang maju dan berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip tata kelola pada suatu BUMDes maka jalannya suatu BUMDes akan lebih terarah sehingga suatu BUMDes akan mampu mewujudkan SDGs Desa. Di Desa Jenggala, BUMDes Bahtera Mandiri sangat berperan penting dalam mewujudkan SDGs Desa, adapun SDGs desa ini dapat terwujud melalui BUMDes disebabkan karena prinsip tata kelola yang ada pada suatu BUMDes, sehingga dapat dikatakan bahwa prinsip tata kelola berperan penting dalam mewujudkan SDGs Desa.

## **Pembahasan**

### **1. Prinsip tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bahtera Mandiri**

#### **a. Kooperatif**

Kooperatif merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan BUMDes. Kooperatif dimaknai bahwa semua pihak yang terlibat di dalam pengelolaan BUMDes perlu memiliki kerjasama yang baik untuk pengembangan dan kelangsungan usaha. Prinsip kooperatif ini mengindikasikan pentingnya modal sosial dalam pengembangan BUMDes. Modal sosial seperti budaya gotong royong, kepercayaan antar anggota masyarakat, melahirkan perilaku saling bekerjasama diantara stakeholder, yaitu pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat. Dalam prinsip kooperatif semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus mampu bekerja sama dengan baik dan mampu menyelesaikan pengaduan masalah atau konflik secara bersama-sama demi kelangsungan dan pengembangan BUMDes. BUMDes Bahtera Mandiri telah berhasil menjalankan kerja sama dengan berbagai kelompok, ini menunjukkan kemampuan untuk

berkolaborasi dengan berbagai pihak, yang merupakan salah satu prinsip tata kelola kooperatif.

**b. Partisipatif**

Partisipatif merupakan prinsip BUMDes yang tidak kalah pentingnya bagi kelangsungan suatu BUMDes. Partisipasi bermakna semua pihak yang terlibat dalam BUMDes bersedia secara sukarela memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. Bentuk dukungan dan partisipasi dari masyarakat terhadap BUMDes dapat menjadi penentu keberlangsungan dan kemajuan BUMDes pada suatu Desa. Adanya partisipasi dan kontribusi dari masyarakat terhadap BUMDes akan dapat membantu BUMDes untuk menentukan usaha-usaha yang akan dijalankan sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. partisipasi masyarakat dalam pembentukan BUMDes Bahtera Mandiri menunjukkan tingkat kesadaran dan minat yang tinggi dalam pengembangan ekonomi lokal. Ini adalah langkah awal yang positif dalam memastikan bahwa BUMDes Bahtera Mandiri memiliki dukungan masyarakat yang kuat. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pembentukan pengurus BUMDes adalah indikasi bahwa mereka memiliki kepercayaan terhadap individu atau kelompok yang akan mengelola BUMDes. Ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes. Adapun partisipasi yang ditunjukkan oleh masyarakat Desa Jenggala dalam penentuan unit usaha yang akan dijalankan oleh BUMDes Bahtera Mandiri adalah langkah penting dalam menentukan arah strategis BUMDes. Dengan melibatkan masyarakat dalam keputusan ini, BUMDes dapat lebih baik mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal.

**c. Emansipatif**

Emansipatif merupakan prinsip BUMDes yang memperlakukan seluruh komponen dalam BUMDes secara sama atau adil. Prinsip emansipatif ini mengindikasikan bahwa BUMDes memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat dalam berkontribusi maupun mendapatkan akses informasi dan kegiatan BUMDes. BUMDes Bahtera Mandiri telah mengadopsi prinsip emansipatif dengan baik dalam beberapa aspek. Pertama, proses pemilihan pengurus BUMDes Bahtera Mandiri yang memberikan kesempatan bagi siapa saja yang ingin menjadi pengurus adalah langkah positif dalam mendukung prinsip emansipatif. Ini memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dalam pengelolaan BUMDes. Kedua, sosialisasi berkala mengenai kegiatan BUMDes Bahtera Mandiri dan kemudahan akses masyarakat untuk mengakses informasi, hal ini penting dalam menjaga transparansi dan memastikan bahwa masyarakat terinformasi dengan baik tentang aktivitas BUMDes. Sebagai organisasi yang bergerak pada bidang social enterprises, BUMDes tidak hanya menjalankan usahanya untuk memperoleh profitabilitas ekonomi, tetapi juga dapat bermanfaat bagi masyarakat baik dibidang sosial maupun ekonomi. Dalam hal ini, BUMDes Bahtera Mandiri berupaya untuk melibatkan masyarakat marjinal dalam kegiatan BUMDes Bahtera Mandiri, hal ini merupakan langkah yang sangat positif dalam mendukung inklusi sosial dan ekonomi. Ini mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat desa. Namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait kurangnya aturan standar dalam pemilihan pengurus BUMDes yang dapat mengakibatkan kinerja pengurus kurang konsisten atau tidak optimal. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas pengurus, mungkin perlu mempertimbangkan pengembangan pedoman atau aturan tertulis yang jelas terkait pemilihan dan tugas pengurus.



**d. Transparan**

Transparan merupakan prinsip keterbukaan dalam BUMDes dimana seluruh aktivitas BUMDes dapat diketahui secara mudah dan terbuka. Penerapan transparansi ini penting bagi BUMDes untuk adanya keselarasan informasi yang didapatkan oleh banyak pihak seperti pihak pemerintah desa yang berperan sebagai stakeholder. Selain itu transparansi ini juga bisa meminimalisir tingkat kecurangan serta dapat meningkatkan kepercayaan terhadap organisasi. BUMDes merupakan salah satu contoh organisasi yang harus menerapkan prinsip transparansi karena BUMDes merupakan usaha milik desa yang tentu saja akan diawasi secara langsung oleh pihak desa dan masyarakat desa. BUMDes Bahtera Mandiri telah menerapkan prinsip transparansi dalam pengadaan aset dengan melibatkan masyarakat desa dan semua komponen yang terlibat dalam BUMDes. Hal ini merupakan langkah positif karena melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. BUMDes Bahtera Mandiri juga telah mengambil langkah untuk memberikan keterbukaan laporan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini merupakan prinsip penting dalam mengelola dana BUMDes karena memungkinkan masyarakat untuk memantau penggunaan dana secara efektif.

**e. Akuntabel**

Prinsip akuntabel pada BUMDes merujuk pada semua kegiatan dalam BUMDes harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif. Akuntabilitas adalah menjamin tersedianya mekanisme, peran tanggung jawab jajaran manajemen yang profesional atas suatu keputusan dan kebijakan yang diambil sehubungan dengan aktivitas operasional. Akuntabilitas mencerminkan bahwa segala bentuk pertanggungjawaban yang diusung suatu lembaga benar-benar berdasarkan kenyataan riil yang terjadi dan tidak ditutup-tutupi apalagi manipulasi. Prinsip akuntabilitas pada BUMDes Bahtera Mandiri sudah cukup baik. Pertama, adanya dokumen AD/ART mendasari struktur organisasi dan tata kelola BUMDes Bahtera Mandiri merupakan langkah penting dalam memastikan akuntabilitas. Kedua, adanya rencana strategis, meskipun rencana strategis hanya mencakup periode 3 tahun, ini adalah langkah positif dalam mengarahkan tujuan dan fokus operasional BUMDes. Ketiga, adanya dokumen RAPB menggambarkan alokasi dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan rencana operasional BUMDes, yang merupakan bagian integral dari akuntabilitas keuangan. Terakhir, adanya laporan keuangan yang menyajikan informasi keuangan yang transparan dan terdokumentasi dengan baik, yang merupakan indikator utama akuntabilitas keuangan. Meskipun sudah ada langkah-langkah positif dalam menciptakan akuntabilitas, masih ada kekurangan berupa rencana strategis hanya sampai 3 tahun dan penyesuaian rencana strategis berdasarkan kondisi dan pendapatan yang ada. Hal ini dapat dianggap sebagai tindakan yang wajar jika penyesuaian tersebut dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan perubahan lingkungan ekonomi dan sosial.

**f. Sustainable/Berkelanjutan**

Prinsip berkelanjutan yaitu kegiatan usaha BUMDes harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat melalui BUMDes. Prinsip berkelanjutan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengacu pada upaya untuk menjalankan operasi BUMDes dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Dari segi relevansi kebutuhan

masyarakat, BUMDes Bahtera Mandiri telah memprioritaskan kegiatan usahanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Ini adalah pendekatan yang sangat penting dalam mencapai berkelanjutan karena mengikuti permintaan dan prioritas masyarakat akan meningkatkan peluang keberhasilan usaha. Dari segi dampak yang ditimbulkan oleh BUMDes Bahtera Mandiri terhadap lingkungan, BUMDes Bahtera Mandiri menekankan bahwa usaha-usaha yang mereka jalankan tidak memiliki dampak buruk terhadap lingkungan. Hal ini mencerminkan kesadaran mereka akan pentingnya pelestarian lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem lokal. Dalam rangka pengembangan usaha, meskipun belum ada rencana pengembangan usaha yang tertulis, BUMDes Bahtera Mandiri memiliki niat untuk memaksimalkan unit usaha yang sudah ada. Ini menunjukkan kesadaran mereka akan pentingnya memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien sebelum mempertimbangkan ekspansi. Meskipun belum ada rencana pengembangan usaha yang tertulis, penting bagi BUMDes Bahtera Mandiri untuk secara rutin mengevaluasi usaha-usaha mereka, mengidentifikasi peluang baru, dan merencanakan tindakan untuk meningkatkan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan mereka. Dengan pendekatan ini, BUMDes Bahtera Mandiri dapat terus menjadi motor penggerak pembangunan berkelanjutan di desa mereka.

## **2. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bahtera Mandiri dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* Desa**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran yang penting dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di tingkat desa. Peran penting BUMDes Bahtera Mandiri dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* desa dapat ditunjukkan melalui:

- 1) Penciptaan peluang pekerjaan: BUMDes Bahtera Mandiri telah memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat desa, yang merupakan langkah positif dalam mencapai SDGs terkait dengan pengurangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
- 2) Pendidikan dan investasi sosial: Pengalokasian 5% dari pendapatan BUMDes untuk pendidikan adalah langkah yang berarti dalam mendukung peningkatan akses dan kualitas pendidikan di desa. Ini mendukung SDGs terkait pendidikan berkualitas.
- 3) Manajemen sampah dan lingkungan: Upaya pengelolaan sampah yang efektif telah mengurangi masalah sampah dan meningkatkan kesehatan serta kenyamanan di desa. Hal ini mendukung SDG terkait kota berkelanjutan.
- 4) Partisipasi masyarakat: Melibatkan masyarakat desa dalam kegiatan BUMDes adalah aspek penting dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang mendukung SDG terkait dengan perdamaian, keadilan, dan institusi yang efektif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam praktiknya BUMDes Bahtera Mandiri telah mampu mewujudkan 9 dari 18 sasaran SDGs desa. Hal ini mencerminkan komitmen dan usaha yang signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Desa Jenggala. Prestasi ini mencakup berbagai aspek pembangunan berkelanjutan, seperti penciptaan lapangan kerja, pendidikan, pengelolaan sampah, partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan perempuan. Ini menunjukkan pendekatan yang komprehensif untuk mencapai SDGs yang beragam.

Meskipun belum semua target SDGs tercapai, BUMDes Bahtera Mandiri telah membuat kemajuan yang signifikan dalam banyak area. Hal ini mencerminkan kompleksitas tantangan yang terkait dengan mencapai SDGs, yang sering kali memerlukan upaya jangka panjang dan berkelanjutan. Analisis ini juga menggarisbawahi peran penting BUMDes dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. BUMDes adalah agen penting yang dapat membantu mencapai berbagai aspek SDGs di tingkat lokal. Namun meskipun pencapaian telah diraih, tantangan tetap ada, dan perjalanan menuju pencapaian seluruh target SDGs adalah

proyek berkelanjutan yang memerlukan dedikasi dan kerja keras yang terus menerus. Keberlanjutan dan komitmen untuk terus memperbaiki dampak positif ini sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Desa Jenggala.

Peran BUMDes dalam mewujudkan SDGs desa ini tidak terlepas dari prinsip tata kelola yang baik pada suatu BUMDes. Prinsip-prinsip BUMDes yaitu kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan memiliki peran penting bagi kelangsungan sebuah BUMDes. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dalam tata kelola dan operasional BUMDes, organisasi ini dapat menjaga kelangsungan dan memberikan dampak positif yang signifikan pada pembangunan berkelanjutan di desa. Prinsip-prinsip ini membantu menciptakan landasan yang kuat untuk BUMDes agar dapat beroperasi secara efisien, mengembangkan usaha secara berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat desa. Secara garis besar, prinsip tata kelola yang ada pada BUMDes Bahtera Mandiri sudah dijalankan dengan baik, hal ini menyebabkan BUMDes Bahtera Mandiri mampu melakukan kegiatan operasional dengan baik sehingga SDGs desa dapat diwujudkan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pengelolaan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip ini sangat krusial:

- 1) Keterlibatan masyarakat: Prinsip partisipatif dan emansipatif pada BUMDes Bahtera Mandiri memastikan bahwa masyarakat desa aktif terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program BUMDes. Ini membantu memahami kebutuhan lokal dan memastikan program-program yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.
- 2) Kepemilikan lokal: Dengan menjalankan prinsip kooperatif, BUMDes Bahtera Mandiri menggabungkan sumber daya dan kompetensi masyarakat desa untuk mencapai tujuan bersama. Ini menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap pembangunan desa.
- 3) Transparansi dan akuntabilitas: Prinsip transparansi dan akuntabilitas memastikan bahwa pengelolaan sumber daya dan keuangan pada BUMDes Bahtera Mandiri dapat dipantau dengan jelas oleh anggota BUMDes dan masyarakat desa. Ini menciptakan kepercayaan dan menghindari korupsi.
- 4) Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan: Pengelolaan yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip ini membantu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Ini mendukung pencapaian berbagai target SDGs yang berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan.
- 5) Efisiensi dan efektivitas: Dengan menjalankan prinsip-prinsip ini, BUMDes Bahtera Mandiri dapat mengelola usaha-usaha dalam BUMDes secara efisien dan menghasilkan hasil yang lebih baik. Ini memungkinkan BUMDes Bahtera Mandiri untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat desa.

Pengelolaan pada BUMDes Bahtera Mandiri yang sesuai dengan prinsip-prinsip ini menyebabkan BUMDes Bahtera Mandiri memiliki landasan yang kuat untuk mencapai SDGs di tingkat desa. Prinsip-prinsip ini membantu memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan cara yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi masyarakat desa dan lingkungan di Desa Jenggala. Dengan demikian, BUMDes Bahtera Mandiri memiliki peran yang krusial dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

## **KESIMPULAN**

### **1. Prinsip Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bahtera Mandiri**

Prinsip tata kelola memiliki peran penting terhadap kelangsungan BUMDes Bahtera Mandiri di Desa Jenggala. BUMDes telah membuat kemajuan dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut. BUMDes Bahtera

Mandiri telah mencapai sejumlah hasil positif dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola. Ini mencakup kemajuan dalam hal partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan berkelanjutan. Meskipun sudah mencapai kemajuan, BUMDes Bahtera Mandiri tetap berkomitmen untuk terus memperbaiki penerapan prinsip tata kelola. Hal ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya pengembangan berkelanjutan dan upaya untuk mencapai standar yang lebih tinggi dalam tata kelola. Dalam praktiknya, penting untuk terus melakukan evaluasi dan pemantauan untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan. Dengan pendekatan yang berkelanjutan dan komitmen untuk terus meningkatkan prinsip-prinsip tata kelola, BUMDes Bahtera Mandiri dapat terus menjadi agen perubahan yang positif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Desa Jenggala.

## **2. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bahtera Mandiri dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals Desa**

Peran BUMDes Bahtera Mandiri dalam rangka mewujudkan *Sustainable Development Goals* desa cukup baik. Hal ini tidak terlepas dari prinsip tata kelola pada BUMDes yang baik. Penerapan prinsip tata kelola yang baik pada BUMDes Bahtera Mandiri di Desa Jenggala mampu membantu BUMDes Bahtera Mandiri dalam mewujudkan SDGs desa. Terdapat 4 sasaran SDGs desa yang ditunjukkan melalui BUMDes Bahtera Mandiri, diantaranya yaitu desa tanpa kemiskinan, pendidikan desa berkualitas, kawasan permukiman desa aman dan nyaman, dan desa damai berkeadilan. Ke-4 SDGs desa ini merupakan pencapaian yang diwujudkan oleh Desa Jenggala melalui kontribusi BUMDes Bahtera Mandiri meskipun belum maksimal namun BUMDes Bahtera Mandiri berusaha membantu desa untuk mencapai SDGs. Kontribusi yang ditunjukkan oleh BUMDes Bahtera Mandiri dalam membantu desa mewujudkan SDGs ini tidak terlepas dari prinsip tata kelola BUMDes yang terdiri dari kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan yang telah diterapkan dengan baik.

## **KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Keterbatasan**

Penelitian ini dilakukan sebelum diberlakukannya Permendes Nomor 6 tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, sehingga hasil dari penelitian ini masih menggunakan Permendes Nomor 21 Tahun 2020, dimana pada Permendes Nomor 21 Tahun 2020 SDGs desa terdiri dari 18 sasaran dan tujuan pembangunan. Sedangkan pada Permendes Nomor 6 Tahun 2023 SDGs desa hanya terdiri dari 17 sasaran dan tujuan pembangunan. Adapun sasaran yang ke-18 yaitu Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif dihapuskan.

### **Saran**

Prinsip tata kelola pada BUMDes Bahtera Mandiri perlu diperbaiki lagi, terutama terkait sistem akuntansi berbasis komputer dan sumber daya manusia yang ada agar dilatih lagi sehingga dapat meningkatkan keefektifan dalam BUMDes Bahtera Mandiri

## **REFERENSI**

- Adha, F. (2022). *Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan SDGs di Desa Hulu Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan*. 1–85.
- Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (2018). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Konsep, Target Dan Strategi Implementasi*.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan. (2007).

- Hidayat, A. (2022). Implementasi Pembangunan Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 5(2), 55–62. <https://doi.org/10.54783/japp.v5i2.624>
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan* (A. F. Suja'i & I. Agusta (Eds.)). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Miles, M. B., & Huberman, A. . (1992). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru*. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. UI Press.
- Napitupulu, M. D., Pasaribu, V. A. R., & Sihombing, N. (2019). *Analisis Implementasi Sustainable Development Goals ( SDGs ) Desa Bakal Gajah Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes )*. 1–11.
- Nasruddin, E., & Misaridin, N. A. (2014). Innovation for a social enterprise business model: An analysis of key success factors. *International Journal of Organizational Innovation*, 7, 149–157. [https://doi.org/10.1016/S0022-%0A3913\(12\)00047-9](https://doi.org/10.1016/S0022-%0A3913(12)00047-9)
- Peraturan Desa Jengjala Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bahtera Mandiri*. (n.d.).
- Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. (n.d.).
- Sofyani, H., Ali, U., & Septiari, D. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *JIA (Jurnal Ilmiah ...)*, 5(2), 325–359.
- Tysara, L. (2021). *17 Tujuan SDGs sebagai Agenda Internasional, Simak Sejarahnya*. Hot.Liputan6.Com
- Wahyuni, Suhaedi, W., & Isnawati. (2022). *Analisis peran bumdes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa raba kecamatan wawo kabupaten bima*. 698–705.
- Widiastuti, H., Manuhara, W., & Rahman, E. (2019). *Menakar Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa di Indonesia*. August. <https://doi.org/10.24914/jeb.v22i2.2410>
- Yuliana, E., & Alinsari, N. (2022). *Penerapan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals Desa*. 6, 2919–2929.